

## ABSTRAK

Tesis dengan judul “*Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*” ini ditulis oleh **Nur Rokhim** dengan Pembimbing Dr. H. Asmawi, M.Ag., dan Dr. M. Muntahibun Nafis, M. Ag.

**Kata Kunci:** Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah, Fiqh dan Hukum Positif.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dualisme dasar hukum dalam menyelesaikan persoalan pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dualisme dasar hukum ini adalah dasar hukum Fiqh Islam dan Hukum Positif dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan dua dasar hukum ini disebabkan tidak adanya aturan baku untuk menggunakan salah satu dari keduanya. Hal ini memberikan peluang kepada masing-masing individu dari kepala KUA sebagai pelaksana dari lembaga perkawinan pemerintah untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya selama menjabat sebagai kepala KUA. Ijtihad inilah yang nantinya akan menjadikan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya karena kebijakan masing-masing yang berbeda pula.

Fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan dan dasar hukum wanita hamil luar nikah dalam perspektif Fiqh dan KHI? (2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil luar nikah di KUA kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? (3) Apa implikasi adanya dualisme dasar hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap lembaga perkawinan dan masyarakat?

Tesis ini bermanfaat untuk menambah wawasan berkaitan dengan kawin hamil luar nikah sehingga dalam pelaksanaannya, baik masyarakat sebagai obyek dari peraturan dan lembaga perkawinan sebagai pelaksana peraturan mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya dasar hukum dan implikasinya ketika diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1) Observasi (Pengamatan). (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang diterapkan adalah (1) Pengecekan keabsahan data (2) Klasifikasi (3) Verifikasi (4) Analisis data (5) Pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Dalam perspektif dasar hukum Fiqh Islam, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’ ahli Fiqh tentang kebolehan kawin hamil luar nikah, ada yang membolehkan

dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, dan ada pula pendapat yang membolehkan menikah dengan laki-laki manapun meskipun bukan yang menghamili calon pengantin wanita, demikian juga ada yang tidak membolehkan dan harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan calon pengantin. Sedangkan dalam perspektif KHI, kawin hamil luar nikah ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3, dimana pasal tersebut berbunyi Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (2) Pelaksanaan kawin hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara prosedural, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan tidak berbeda dengan calon pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan yaitu pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan diberikan penasehatan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya, dan ada pula kepala KUA yang meminta surat pernyataan tentang kebenaran janin yang ada dalam kandungan adalah benar-benar dari hasil perbuatan mereka berdua. (3) Implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan terhadap lembaga perkawinan adalah tidak adanya aturan baku yang harus digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan akan menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan kebijakan dan saharusnya ini tidak terjadi. Sementara itu, bagi masyarakat adalah terjadinya gejolak dimasyarakat terutama pada masyarakat yang pemahaman agamanya kental dan berbasis pondok pesantren apabila Hukum Positif dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan KHI diterapkan sebagai dasar hukum perkawinan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat modern akan kurang dapat menerima apabila dasar hukum Fiqh Islam diterapkan.

## ABSTRACT

Thesis with Title, "*Marriage of an Unwed pregnancy Woman in the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Case Study in KUA Gandusari District, Trenggalek Regency)*" Written by **Nur Rokhim**. Department of Islamic Family Law Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor Dr. H. Asmawi, M.Ag., dan Dr. M. Muntahibun Nafis, M. Ag.

**Keywords:** Marriage of a Unwed pregnancy Woman, Fiqh and Positive Law.

This research is motivated by the existence of a legal basis dualism in solving the problem of marriage of unmarried pregnant women in KUA, Gandusari District, Trenggalek Regency. This legal dualism is the legal basis of Islamic Fiqh and Positive Law in this case is Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Decree No.1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. The use of these two legal grounds is due to the absence of standard rules for using one of the two. This provides an opportunity for each individual from the head of the KUA as the executor of the government marriage agency to perform jihad according to his abilities and experience while serving as head of the KUA. Ijtihad is what will later make it different from one another because of their different policies.

The problem focus in this thesis is: (1) How is the provisions and legal basis of Unwed pregnancy Woman in the Perspective of Fiqh and KHI? (2) How is the implementation of an Unwed pregnancy Woman in the Perspective of Fiqh and Positive Law in KUA Gandusari District, Trenggalek Regency?. (3) What are the implications of the dualism of the legal basis for the marriage of an unwed pregnancy woman to marriage institutions and the community?

This thesis is useful to add insight related to extra-marital pregnancy marriage so that in its implementation, both the community as the object of the regulations and the marriage institution as implementing regulations know what and how the legal basis and its implications when applied.

This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. The techniques regarding the data in this study are: (1) Observation (Observation). (2) Interviews and (3) Documentation. While the data processing method applied is (1) checking data validity (2) classification (3) verification (4) data analysis (5) making reports.

Based on the results of this Thesis, the authors conclude that: (1) In the basic perspective of Islamic Fiqh law, there is a difference of opinion among scholars Fiqh experts about the ability to marry of Unwed pregnancy, there are those who allow the marriage note to be the man who impregnated her, and there

are also opinions that allow to marry any man even if not impregnating the bride, likewise there are those who do not allow and must wait for the birth of a child in the womb. Whereas in the KHI perspective, the marriage of Unwed pregnancy is regulated in article 53 paragraphs 1 to 3, where the article reads An Unwed pregnancy woman, can be married to the man who impregnated her. Marriage with a pregnant woman referred to in paragraph (1) can take place without waiting for the birth of her child. With a marriage going on when a woman is pregnant, there is no need for remarriage after the child is born. (2) The implementation of unmarried pregnant marriage in KUA Gandusari District in practice is procedurally, starting from registration, examination and implementation is not different from the bride who is not yet pregnant, but in the examination for brides who are already pregnant there are some special treatments that are applied namely the examination was carried out in a closed room and given advice regarding the situation and condition experienced by the two brides and their families, and there was also the head of the KUA who asked for a statement about the truth of the fetus in the womb that was really the result of their actions. (3) The implication of the basic dualism of marriage law for marriage institutions is that the absence of standard rules that must be used as a basis in resolving a problem will lead to differences in references resulting in differences in policies and this should not occur. Meanwhile, for the community is the occurrence of turmoil in the community, especially in communities whose understanding of religion is thick and based on Islamic boarding schools if Positive Law in this case Law No.1 Year 1974 and KHI is applied as the basis of marriage law, and vice versa in modern society will be less able to accept if the legal basis of Islamic Fiqh is applied.

## الملخص

رسالة الماجستير بالموضوع "زواج المرأة الحامل خارج النكاح من جهة الشريعة والقانون الإيجابي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية منطقة غاندوساري ترنجاليك)" قد كتبها نور الرحيم. قسم الأحوال الشخصية دراسة العليا جامعة الإسلامية الحكومية تولونج أحونج. المشرف: أ. الدكتور الحاج أسموي الماجستير والدكتور متحب النفيس الماجستير.

**كلمة الإرشادية:** زواج المرأة الحامل خارج النكاح، الفقه والقانون الإيجابي.

كانت خلفية رسالة الماجستير زواج المرأة الحامل خارج النكاح من جهة الفقه والقانون الإيجابي في حل مسألة زواج النساء الحوامل غير المتزوجات في مكتب الشؤون الدينية منطقة غاندوساري ترنجاليك. هذا الزدواج القانوني هو الأساس القانوني للفقه الإسلامي والقانون الإيجابي في هذه الحالة هو القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج والمرسوم الرئاسي رقم ١ لعام ١٩٩١ بشأن تجميع الشريعة الإسلامية. يرجع استخدام هذين الأساسين القانونيين إلى عدم وجود قواعد قياسية لاستخدام أحدهما. هذا يوفر فرصة لكل فرد من رئيس مكتب الشؤون الدينية كمنفذ لوكالة الزواج الحكومية لأداء الجهاد وفقاً لقدراته وتجربته أثناء خدمته رئيساً لمكتب الشؤون الدينية. الاجتهاد هو ما سيجعلها مختلفة فيما بعد عن بعضها البعض بسبب سياساتها المختلفة.

تركيز وسائل في هذه رسالة الماجستير كما يلي : (١) كيف الأحكام القانونية والأساس عن زواج المرأة الحامل خارج النكاح من جهة الفقه والقانون الإيجابي؟ (٢) كيف ممارسة زواج المرأة الحامل خارج النكاح في مكتب الشؤون الدينية منطقة غاندوساري ترنجاليك؟ (٣) ما هي الآثار المتربطة على ازدواجية القانون الأساسية عن ممارسة زواج المرأة الحامل خارج النكاح على مؤسسات الزواج والمجتمع؟.

هذه رسالة الماجستير مفيدة لإضافة نظرة ثاقبة تتعلق بزواج الحمل خارج إطار الزواج، بحيث في المجتمع ، كهدف للوائح ومؤسسات الزواج، تعرف اللوائح التنفيذية على ماذا وكيف الأساس القانوني وأثاره عند تطبيقها.

تم إجراء هذا البحث باستخدام الأساليب النوعية مع المنهج الوصفي. التقنيات المتعلقة بالبيانات في هذه الدراسة هي: (١) الملاحظة (الملاحظة). (٢) المقابلات و (٣) التوثيق. بينما أسلوب معالجة البيانات المطبق هو (١) التحقق من صحة البيانات (٢) التصنيف (٣) التتحقق (٤) تحليل البيانات (٥) إعداد التقارير.

نتائج البحث تدل أنّ : (١) في المنظور الأساسي للشريعة الفقهية الإسلامية، هناك اختلافات في الرأي بين علماء الفقه الفقهي حول القدرة على الزواج من زواج الزوجية ، فهناك من يسمح بمذكرة الزواج هو الرجل الذي قام بتلقيحها، وهناك أيضاً آراء تسمح بالزواج من الرجال حتى إذا لم يكن هناك رجل يُشرب عروساً محتملة، وهناك أيضاً من لا يسمحون بذلك ولا بد من انتظار ولادة طفل في الرحم. بينما من منظور الشريعة الإسلامية، تنظيم هذا الزواج الحامل غير المتزوج في الفقرات من ١ إلى ٣ من المادة ٥٣، حيث تقرأ المادة المرأة الحامل خارج إطار الزواج، ويمكن أن تتزوج من الرجل الذي قام بتلقيحها. يمكن الزواج من امرأة حامل المشار إليها في الفقرة (١) دون انتظار ولادة طفلها. مع زواج يحدث عندما تكون المرأة حاملاً، ليست هناك حاجة للزواج بعد ولادة الطفل. (٢) ممارسة زواج المرأة الحامل خارج النكاح في مكتب الشؤون الدينية منطقة غاندوساري ترنجاليك في الممارسة، من الناحية الإجرائية، بدء من التسجيل والفحص والتنفيذ لا يختلف عن عروس ليست حاملاً بعد، ولكن في الفحص للعروس الحامل بالفعل، هناك بعض العلاجات الخاصة التي يتم تطبيقها والتي يتم إجراء الفحص في غرفة مغلقة وتقديم المشورة المتعلقة بالوضع والظروف تعانى من كل من العروس والعريس وعائلاتهم، وهناك أيضاً رئيس مكتب الشؤون الدينية الذي طلب بياناً عن حقيقة الجنين في الرحم هو حقاً نتيجة لأفعالهم. (٣) الآثار المترتبة على ازدواجية القانون الأساسية عن ممارسة زواج المرأة الحامل خارج النكاح على مؤسسات الزواج والمجتمع هو أن عدم وجود قواعد قياسية يجب استخدامها كقدم في حل مشكلة سيؤدي إلى اختلافات في المراجع مما يؤدي إلى اختلافات في السياسات وهذا لا يجب أن يحدث. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للمجتمع، هناك اضطرابات في المجتمع، وخاصة في المجتمعات التي يكون فهمها للدين سميكاً ويستند إلى المدارس الداخلية الإسلامية إذا تطبيق القانون الإيجابي في هذه الحالة القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ و تجميع الشريعة الإسلامية كأساس لقانون الزواج، والعكس بالعكس في المجتمع الحديث سيكون أقل قدرة على قبول إذا تم تطبيق الأساس القانوني للفقه الإسلامي.